

### SRIKANDI RIMBA PAPUA: Kisah Inspiratif dari KTH di Merauke dan Jayapura

ARTIKEL LAINNYA

**FORCLIME LAPORKAN PROGRES PENGEMBANGAN ELEARNING kepada Kepala BP2SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

**KPH KULAWI ADAKAN RAPAT KOORDINASI NILAI KELAS KUPS di Desa Doda, Sulawesi Tengah**

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kaji Rencana Kehutanan Nasional (RKTN) 2011-2030**

### Editorial

Selamat datang di Newsletter FORCLIME edisi Agustus 2024! Edisi kali ini mengangkat kegiatan FORCLIME dalam mendukung mitra di Tanah Papua, yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Provinsi Papua dan Balai Taman Nasional Wasur di Provinsi Papua Selatan. Fokus utama kami adalah pemberdayaan masyarakat di tingkat kelompok tani hutan, dengan penekanan khusus pada peningkatan peran serta perempuan dalam setiap kegiatan di kampung binaan.

Ada anggapan umum bahwa urusan hutan adalah dunia laki-laki. Mereka memimpin, mereka di depan, sementara perempuan tertinggal di belakang. Kontribusi perempuan dalam menjaga hutan dan lingkungan seringkali terlupakan, padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran krusial. Tangan-tangan merekalah yang terampil mengumpulkan hasil hutan bukan kayu – tanaman obat, buah-buahan, kayu bakar – sumber daya penting yang menopang kehidupan keluarga. Mengabaikan peran dan pengetahuan mereka sama dengan mengabaikan potensi besar dalam menjaga kelestarian hutan kita.

Memasukkan perspektif gender dalam pengelolaan hutan bukanlah sekadar isu keadilan, melainkan kebutuhan mendesak. Berbagai riset membuktikan bahwa ketika perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, hasilnya lebih adil dan berkelanjutan secara ekologis. Sayangnya, jalan perempuan untuk duduk setara di meja diskusi masih terjal. Norma budaya dan bias gender, bagai tembok kokoh

membatasi partisipasi mereka, baik secara formal maupun informal. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan kehutanan yang setara masih menjadi mimpi bagi banyak perempuan, menghambat potensi mereka untuk berkontribusi secara maksimal.

FORCLIME, menyadari urgensi ini, berkomitmen untuk mendorong kesetaraan gender di setiap tingkatan pengelolaan hutan masyarakat.

Ini berarti menciptakan kebijakan yang menjamin suara perempuan didengar dalam pengambilan keputusan, menyediakan program pelatihan yang responsif gender, dan membangun lingkungan dimana kontribusi mereka dihargai setinggi-tingginya. Kesetaraan gender bukanlah pelengkap, melainkan fondasi utama dalam membangun pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Namun, perjalanan menuju hutan lestari bukanlah tugas eksklusif perempuan. Edukasi dan keterlibatan laki-laki juga tak kalah penting. Kita perlu membangun kesadaran bersama, membantu para lelaki memahami urgensi kesetaraan gender, dan mengajak mereka untuk menjadi mitra sejati dalam mewujudkan perubahan. Sebab, hutan lestari hanya dapat terwujud ketika perempuan dan laki-laki berjalan beringan, saling bahu-membahu menjaga warisan alam untuk generasi mendatang.

**Mohammad Sidiq**

*Manajer bidang strategis pengelolaan hutan Lestari dan Koordinator Tanah Papua*

# Srikandi Rimba Papua: Kisah Inspiratif dari KTH di Merauke dan Jayapura

*Hutan Lestari Berakar dari Kesetaraan: Peran Perempuan Tak Bisa Diabaikan*

*Anna Manyakori, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua*

“Hutan di Papua adalah mama”, begitulah filosofi yang dipegang teguh masyarakat Papua. Layaknya seorang ibu, hutan adalah sumber kehidupan yang harus dijaga, dilindungi, dihormati, dijunjung tinggi, dan dilestarikan. Keterikatan masyarakat Papua dengan alam begitu erat, membentuk identitas dan jati diri yang unik dan rumit. Bagi mereka, sumber daya alam bukan sekadar komoditas, melainkan sumber pengetahuan yang diwariskan turun-temurun dalam tatanan adat yang dijunjung tinggi.

Di tengah hutan Papua yang megah, perempuan-perempuan tangguh berdiri sejajar dengan kaum pria, menjaga kelestarian alam dengan tangan-tangan penuh kasih. Mereka adalah Srikandi Rimba, pejuang lingkungan yang kiprahnya jarang tersorot. Sejak tahun 2022, FORCLIME, program kerja sama Indonesia–Jerman, bekerja membantu unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Papua, merangkul kelompok tani hutan (KTH) di Merauke dan Jayapura untuk mengoptimalkan potensi sumber daya hutan secara berkelanjutan. Di Merauke dengan fokus pada dua sub-suku, yaitu Marori Menggey di Wasur dan Kanume di Yanggandur, sementara di Jayapura berfokus pada sub-suku, yaitu Bhuyakha di

Kampung Babrongko, sub-suku Moi di Kampung Dosai, dan sub-suku Tepera di Kampung Tablasupa.

Di Kampung Yanggandur, kita dapat bertemu dengan Ibu Agnes Maturbongs dan Ibu Yani. Meski bukan berasal dari Suku Kanume, dedikasi mereka terhadap masyarakat diakui dengan dianugerahinya marga dari tetua kampung. Keduanya menjadi motor penggerak ekonomi dan pemberdayaan perempuan melalui KTH *Empi Wai Tetepu* dan KTH Sederhana. Ibu Yani, dengan KTH Sederhana, mengajak para ibu muda untuk mengolah pisang menjadi keripik aneka rasa, serta memproduksi teh sarang semut, minyak kemiri, dan buah merah. Sementara itu, Ibu Agnes, melalui KTH *Empi Wai Tetepu*, fokus pada produksi madu Pokos, buah merah, dan minyak kemiri.

Keberagaman gender dalam struktur organisasi KTH di Merauke dan Jayapura, dengan ketua perempuan di KTH *Moruti*, *Nau Payad*, *Empi Wae Tetepu*, dan Sederhana, serta ketua laki-laki di KTH Dosai, Tablasupa, dan Babrongko, menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan di Papua. Dukungan dan pemberdayaan yang berkelanjutan, dengan melibatkan perempuan sebagai subjek utama, adalah kunci untuk mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera di Tanah Papua.



Ibu Anna Kaize menata Galeri Anggrek Bualas Merauke.

## Mengungkap Peran Perempuan Papua

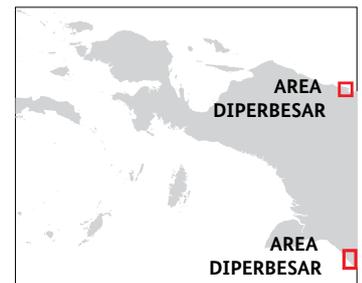
Di balik rimbanya hutan Papua, tersembunyi kekuatan tak terduga yang menjaga keseimbangan alam dan budaya. Perempuan Papua, dengan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun, memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian alam, meski seringkali luput dari sorotan.

Di Kampung Dosai, Mama Agustina dari KTH *Dambu Kahbrai*, berbagi kisah tentang kolaborasi perempuan dan laki-laki dalam budidaya anggrek. Ide brilian para mama untuk membangun rumah kultur jaringan menjadi penggerak usaha anggrek, yang ilmunya kemudian dibagikan kepada kampung lain. Sementara itu, di Kampung Tablasupa, para mama dari KPA *A'memay* tak hanya berkontribusi dalam menjaga hutan dari api, tetapi juga jeli melihat potensi ekonomi dari hasil hutan bukan kayu dan ekowisata. Di Kampung Babrongko, KTH *Isite* menjadi wadah harmonisasi peran perempuan dan laki-laki dalam seni ukir kulit kayu. Para tetua mengajarkan motif tradisional kepada pemuda, yang kemudian diteruskan kepada para perempuan untuk dijahit menjadi produk bernilai ekonomi. Meskipun terikat adat, kreativitas perempuan tetap bersinar melalui goresan pola modern pada kulit kayu.

Kisah-kisah ini membuktikan bahwa perempuan Papua bukan hanya penjaga hutan, tetapi juga agen perubahan yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam.

Di selatan Papua, perempuan Kampung Wasur dan Kampung Yanggandur, Merauke, tak hanya hidup selaras dengan alam, tetapi juga menjadikannya sumber inspirasi untuk berkarya. Kampung Wasur, dengan kekayaan alam Taman Nasional Wasur, menjadi saksi bisu bagaimana perempuan dan laki-laki bahu-membahu mengolah minyak kayu putih, membudidayakan anggrek, hingga mengembangkan ekowisata yang memikat.

Sementara itu, di Kampung Yanggandur, semangat perempuan adat *Kanume* berkobar melalui kelompok masyarakat binaan. Ibu Agnes dan Ibu Yani menjadi pelopor yang merangkul para mama untuk meningkatkan kapasitas diri dan terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Kelompok *Moruti*, *Nau Payad*, dan *Sawur*, yang dipimpin oleh para mama tangguh, menjadi bukti nyata bahwa perempuan mampu berdiri sejajar dalam menjaga kelestarian alam dan membangun perekonomian keluarga.



**Di balik rimbanya hutan Papua, tersembunyi kekuatan tak terduga yang menjaga keseimbangan alam dan budaya. Perempuan Papua, dengan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun, memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian alam, meski seringkali luput dari sorotan.**

3



**Kiri:** Ibu Sara Wally sedang melukis di atas kulit kayu pada Pelatihan Pengembangan Kulit Kayu di Kampung Babrongko. **Kanan:** Peserta pelatihan melukis di atas kayu kulit kayu dan kerajinan tangan di Kampung Babrongko.

## Jalan Terjal Menuju Kesetaraan: Menjawab Tantangan

Perjalanan menuju kesetaraan gender di Papua masih terbentang panjang dan penuh tantangan. Sistem patriarki yang mengakar kuat dalam struktur adat dan sosial masyarakat, menciptakan jurang pemisah yang nyata antara perempuan dan laki-laki. Untuk mewujudkan kesetaraan gender di Papua, dibutuhkan upaya kolektif dari berbagai pihak. Mulai dari meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender, memberikan akses yang setara terhadap pendidikan dan ekonomi, hingga mereformasi kebijakan yang diskriminatif.



### 1. Mengakui Tembok Pembatas yang Ada.

Tak dapat dipungkiri, pandangan sistem patriarki telah membatasi ruang gerak perempuan Papua. Hukum adat yang lebih berpihak pada laki-laki, menjadikan perempuan terpinggirkan dalam kepemilikan lahan dan akses terhadap sumber daya hutan. Keterbatasan akses ini berdampak pada peluang ekonomi dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga maupun masyarakat.



### 2. Keterbatasan Akses dan Peluang.

Minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan gender di kalangan masyarakat, termasuk dalam kelompok tani hutan, semakin memperkuat ketimpangan yang ada. Perempuan seringkali tidak dilibatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan, meskipun merekalah yang merasakan dampak langsung dari kerusakan alam.



### 3. Kepemilikan dan Pengontrolan Lahan.

Hak kepemilikan dan kontrol atas lahan yang timpang, menempatkan perempuan pada posisi rentan. Mereka kesulitan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan rentan terhadap eksploitasi. Padahal, peran perempuan dalam menjaga kelestarian alam dan memanfaatkan sumber daya hutan secara bijaksana, tak perlu diragukan lagi.



### 4. Kerentanan Ekonomi.

Keterbatasan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan peluang ekonomi, membuat perempuan Papua lebih rentan terhadap kemiskinan. Beban pekerjaan domestik yang dipikul, seringkali membatasi ruang gerak mereka untuk mengembangkan diri dan meningkatkan taraf hidup keluarga.



### 5. Meruntuhkan Konstruksi Sosial.

Pandangan bahwa pekerjaan domestik adalah tugas perempuan, menjadi konstruksi sosial yang perlu dirombak. Peran domestik bukanlah kodrat, melainkan hasil kesepakatan bersama antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga.



Ibu Natalia Maturan sedang membuat struktur organisasi KTH di Kampung Yanggandur pada saat Pelatihan Manajemen Organisasi dan *Public Speaking*

## Investasi dalam Pemberdayaan: Jalan Menuju Masa Depan Berkelanjutan

Investasi dalam pemberdayaan perempuan adalah investasi untuk masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Mari bersama-sama wujudkan mimpi besar ini, demi Papua yang lebih gemilang. Sinergitas antara UPT KLHK, DKLH Papua, dan masyarakat sejak tahun 2022 hingga 2024 telah menorehkan pembelajaran berharga tentang pentingnya pemberdayaan perempuan di Papua. Investasi dalam pemberdayaan perempuan bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk membangun masa depan yang berkelanjutan.



**1. Merangkul Potensi Perempuan:** Keterlibatan perempuan dalam kelompok tani hutan terbukti memberikan dampak positif, tidak hanya pada peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga pada kelestarian alam. Ketika perempuan berdaya, mereka mampu mengoptimalkan potensi diri dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bersama.



**2. Membangun Kapasitas dan Kesadaran:** Peningkatan kapasitas tentang kesetaraan gender bagi kelompok tani hutan menjadi krusial. Pemahaman yang utuh tentang peran dan potensi perempuan, serta pentingnya kesetaraan dalam pengambilan keputusan, akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk berkembang.



**3. Sinergi Peran Perempuan dan Laki-laki:** Pembagian peran yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki merupakan kunci sukses kelompok tani hutan. Sinergi keduanya akan menciptakan kekuatan yang luar biasa dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.



**4. Membuka Jalan Partisipasi:** Perempuan harus diberikan ruang dan kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan di tingkat kampung hingga provinsi. Suara dan aspirasi mereka perlu didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.



**5. Perempuan: Agen Perubahan untuk Alam:** Perempuan memiliki ikatan yang erat dengan alam. Mereka adalah penjaga hutan yang tangguh dan pewaris kearifan lokal yang berharga. Memberdayakan perempuan berarti menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang.



**6. Memperkuat Jaringan dan Kolaborasi:** Saling berbagi pengetahuan dan pengalaman antar kelompok tani hutan di Tanah Papua dan daerah lainnya di Indonesia, akan memperkaya wawasan dan memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan.



Pelatihan Manajemen Organisasi dan *Public Speaking* bagi kelompok tani hutan di Kampung Yanggandur

## Sebuah Visi Bersama untuk Masa Depan Berkelanjutan

Peran perempuan dalam menjaga kelestarian hutan di Papua tak terbantahkan. Mereka adalah penjaga hutan yang tangguh, pewaris kearifan lokal, dan tulang punggung ekonomi keluarga. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah. Sistem patriarki, akses terbatas, dan konstruksi sosial yang timpang, menjadi tembok pembatas bagi perempuan untuk berkontribusi secara optimal.

Pemberdayaan perempuan bukanlah sekadar solusi untuk pelestarian lingkungan, melainkan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan pelestarian budaya. Ketika perempuan berdaya, mereka mampu mengangkat derajat keluarga, membangun komunitas yang tangguh, dan menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang.

FORCLIME telah membuktikan bahwa investasi dalam pemberdayaan perempuan memberikan dampak positif yang luar biasa. Kini, saatnya kita bergandengan tangan, mendukung organisasi serupa, menyuarakan perubahan kebijakan, dan terlibat aktif dalam inisiatif yang menempatkan perempuan sebagai pemimpin dalam pelestarian alam.

Mari bersama ciptakan masa depan di mana hutan dan masyarakat hidup berdampingan secara harmonis, di Papua dan di seluruh Indonesia. Masa depan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan, berakar dari kesetaraan dan pemberdayaan perempuan.



Atas: Membuat Struktur KTH Empi Wae Tetepu-Merauke. Tengah: Menata Galeri Anggrek Bualas Merauke. Bawah: KTH Empi Wai Tetepu Yanggandur.

***Pemberdayaan perempuan bukanlah sekadar solusi untuk pelestarian lingkungan, melainkan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan pelestarian budaya. Ketika perempuan berdaya, mereka mampu mengangkat derajat keluarga, membangun komunitas yang tangguh, dan menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang.***



## FORCLIME Laporkan Progres Pengembangan eLearning kepada Kepala BP2SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam rangka melaporkan progres pengembangan eLearning di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah didukung GIZ, FORCLIME melakukan audiensi kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Drs. Ade Palguna Ruteka, pada tanggal 5 Juli 2024 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, hadir Kepala Pusat Diklat Lingkungan Hidup, Kepala Pusat Penyuluhan, Kepala Pusat Pelatihan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris BP2SDM, pejabat Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM serta Tim FORCLIME yang dipimpin oleh bapak Florian Moder, Direktur Program FORCLIME yang menggantikan bapak Georg Buchholz.

Dalam pertemuan tersebut, FORCLIME melaporkan bahwa [kerja sama FORCLIME dengan Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan \(Pusat Diklat SDM LHK\) dalam pengembangan eLearning telah dilaksanakan sejak 2013](#). Berbagai upaya pengembangan kapasitas untuk tingkat-tingkat kebijakan, organisasi dan individu di Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Pelatihan LHK (pejabat struktural, widyaiswara maupun tenaga administrasi) telah dilaksanakan selama satu dekade ini. Ketika pandemi COVID-19, Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Pelatihan LHK tetap mampu memberikan pelayanan pelatihan kepada aparatus maupun non aparatus dengan menggunakan eLearning.

Lebih lanjut FORCLIME melaporkan bahwa pada tahun 2023, Pusat Diklat SDM LHK meminta dukungan untuk pengembangan Massive Open Online Course (MOOC). Yang kemudian ditindaklanjuti FORCLIME dengan melakukan [kajian kesiapan Pusat Diklat SDM LHK dalam penyelenggaraan MOOC](#) pada bulan Maret 2024. Dari

kajian tersebut diperoleh sejumlah masukan yang terkait aspek kebijakan, manajerial, maupun teknis yang perlu intervensi dari pihak manajemen Pusat Diklat SDM LHK maupun BP2SDM. Perkembangan terakhir mengenai pengembangan MOOC adalah penyelenggaraan lokakarya untuk menyusun Roadmap Pengembangan MOOC serta Training of Trainer untuk pelaksanaan MOOC, yang keduanya dilaksanakan pada bulan Juli 2024.

Pada audiensi tersebut, beberapa unit kerja BP2SDM menyampaikan harapan dukungan FORCLIME dalam beberapa kegiatan, antara lain:

1. Dukungan pengembangan eLearning untuk program Sekolah Hijau Adiwiyata, yang disampaikan oleh Pusat Pelatihan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Dukungan pengembangan eLearning untuk meningkatkan kapasitas Penyuluh Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang disampaikan oleh Pusat Penyuluhan.
3. Pusat Perencanaan dan Pengembangan (Pusrenbang) SDM telah melaksanakan training need assessment (TNA), yang laporannya dapat digunakan untuk pengembangan modul MOOC.
4. Dukungan untuk melakukan kajian terhadap peraturan dan kebijakan terkait dengan eLearning serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sekarang, disampaikan oleh Bagian Hukum Sekretariat BP2SDM.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

- Edy Marbyanto, Manajer bidang Strategis Pengembangan Kapasitas SDM



# KPH Kulawi Adakan Rapat Koordinasi Nilai Kelas KUPS di Desa Doda, Sulawesi Tengah

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dibentuk sebagai upaya untuk mengajak masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Melalui KUPS, masyarakat desa khususnya yang tergabung dalam kelompok dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan seraya mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Dalam rangka peningkatan kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ada di Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Doda, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kulawi, didukung FORCLIME, mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 8 Juli 2024 di kantor KPH Kulawi. Rapat ini dilakukan dalam rangka persiapan Penilaian Kelas yang dilakukan untuk dua KUPS, yaitu Sintuwu Singgani dan Namomi Singgani, yang saat ini masuk dalam kategori kelas *Blue*, dan dicanangkan untuk naik ke kelas *Silver*. Penilaian untuk peningkatan kelas KUPS, mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan dilakukan dua kali dalam setahun untuk peningkatan kelas KUPS. Penilaian kelas ini nantinya juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan yang dapat didukung oleh KPH maupun para pihak lainnya dalam proses meningkatkan kelas KUPS yang ada di LPHD Doda.

Pertemuan yang dihadiri oleh Penyuluh Perhutanan Sosial KPH Kulawi, serta Koordinator Penyuluh KPH Kulawi, juga membahas tentang rencana sosialisasi terkait dengan keberadaan Hutan Desa Doda agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui tentang keberadaan area Hutan Desa Doda. Selain itu, dibahas pula rencana pemasangan papan nama KUPS Sintuwu Singgani dan Namomi Singgani pada rumah anggota KUPS yang dijadikan Sekretariat KUPS. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat desa dapat lebih mengetahui tentang keberadaan LPHD maupun KUPS yang ada di Desa Doda. Bagi pengurus dan anggota, keberadaan sekretariat ini dapat digunakan sebagai wadah berkolaborasi untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari produk yang dibuat oleh anggota kelompok.



Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

- **Muhammad Yusuf**, Advisor, Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari
- **Ismet Khaeruddin**, Advisor Senior, Keanekaragaman Hayati dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

## Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kaji Rencana Kehutanan Nasional (RKTN) 2011-2030

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mulai merevisi Rencana Kehutanan Nasional (RKTN) 2011 – 2030. Revisi ini dipandang penting untuk memastikan bahwa rencana tersebut tetap relevan, efektif dan sejalan dengan prioritas nasional dan komitmen internasional saat ini. Berdasarkan peraturan yang ada, Rencana Kehutanan harus dievaluasi pada saat pelaksanaannya untuk mengukur efektivitas dan efisiensi berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana tersebut. Evaluasi ini dilakukan setidaknya sekali setiap lima tahun, sedangkan proses revisinya mencakup evaluasi komprehensif terhadap rencana yang ada. Evaluasi tersebut mempertimbangkan setiap perubahan yang telah dilakukan terhadap peraturan, kebijakan, dan kinerja selama lima tahun terakhir guna memberikan peta jalan pembangunan kehutanan berkelanjutan di Indonesia hingga tahun 2030.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) KLHK, didukung oleh Proyek FOLU Net Sink 2023 dan FORCLIME, menyelenggarakan pertemuan dua hari yang diadakan pada tanggal 2 – 4 Juli 2024 di Jakarta. Tujuan dari acara ini adalah untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan rencana dengan para pemangku kepentingan yang bergerak di bidang kehutanan, serta membahas arah, kebijakan, strategi dan sasaran pengelolaan hutan dan penyelenggaraan

kehutanan. Tujuannya untuk menjaring masukan dari pihak-pihak terkait guna memberikan masukan bagi revisi RKTN periode 2011 – 2030.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Ditjen PKTL akan menyelenggarakan serangkaian FGD guna menyempurnakan lebih lanjut dokumen tersebut, dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan pakar terkait guna memastikan keakuratan, relevansi, dan keselarasan dokumen tersebut dengan tujuan pengelolaan kehutanan saat ini. dan kebijakan.



Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

- **Fadhilatunnisa Nurhadiza**, Advisor junior bidang pengelolaan hutan lestari
- **Mohammad Rayan**, Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik
- **Wandojo Siswanto**, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

FORCLIME Forests and Climate Change Programme  
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor  
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia  
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214  
Fax: +62 (0)21 572 0193  
www.forclime.org

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: [ratu.widyawati@giz.de](mailto:ratu.widyawati@giz.de)